

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI
MI NAJAHYAH KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA
PALEMBANG TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Sebagian Persyaratan
Dalam mencapai Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**MAR'ATUS SHOLIAH
07011181320024**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Indralaya, Ogan Ilir

Juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI
MI NAJAHYAH KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA
PALEMBANG TAHUN 2016**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MAR'ATUS SHOLIHAH

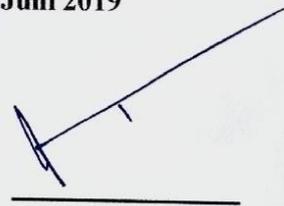
07011181320024

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, ²⁹ Juni 2019

Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si

NIP. 197905012002121005



Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si

NIP. 196603051993022001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MI Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2016” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 04 Juli 2019.

Indralaya, 04 Juli 2019

Ketua:

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

Anggota:

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003
3. Ermanovida, S.Sos., M.Si.
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.
NIP 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos. M.PA
NIP 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri. (Benyamin Franklin)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

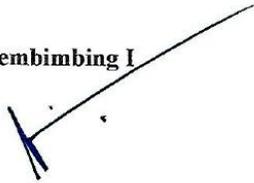
1. Kedua orangtuaku, Buya H.Zulkifli Ujang dan Umi Nyimas Fauziah
2. Kakak-kakak dan adikku
3. Teman-teman angkatan 2013 Ilmu Administrasi Negara
4. Almamater yang menjadi kebanggaanku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MI Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2016”. Latar belakang dari penelitian ini adalah kesimpangsiuran data dalam pendistribusian penerima Kartu Indonesia Pintar, ketidaktepatan sasaran dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama mengenai PIP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MI Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang di ukur dalam enam variabel kinerja implementasi yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, disposisi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Kementerian Agama melakukan sosialisasi secara langsung kepada siswa dan orangtua, dan sekolah sebaiknya lebih teliti dalam melakukan pengusulan terhadap siswa yang layak menerima bantuan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana yang diperoleh siswa agar dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Implementasi, Program Indonesia Pintar, Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Indralaya, Juli 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



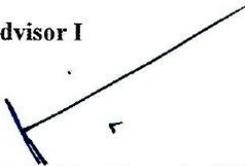
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in MI Najahiyah, Seberang Ulu I District, Palembang City in 2016". The background of this study is data confusion in the distribution of recipients of Smart Indonesia Cards, inaccurate targets in the distribution of Smart Indonesia Cards, and lack of socialization carried out by the Ministry of Religion regarding PIP. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in MI Najahiyah Palembang Seberang Ulu I District 2016. The research used a qualitative descriptive method. This research uses the theory of Donald Van Metter and Carl Van Horn which are measured in six implementation performance variables, namely standards and policy objectives, resources, communication between organizations and implementing activities, characteristics of implementing agents, dispositions, and social, economic and political conditions. Data collection techniques are carried out through observation, interview, and documentation techniques. The results of the study indicate that the implementation of the program has gone well. The results of this study recommend that the Ministry of Religion directly disseminate to students and parents, and schools should be more thorough in making proposals for students who deserve to receive assistance and supervise the use of funds obtained by students to be used properly.

Keywords: *Implementation, Smart Indonesian Program, and Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah.*

Advisor I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Advisor II



Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Indralaya, Juli 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Zailani Surva Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MI Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2016”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya. Penulis sudah melakukan semaksimal mungkin untuk membuat skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Buya H. Zulkifli Ujang dan Umi Nyimas Fauziah yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dukungan baik moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini serta telah sabar menunggu untuk melihat saya mendapatkan gelar sarjana dan memakai toga.
2. Kakak-kakak dan adik saya yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si dan Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018

6. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi kelancaran saya.
7. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku dosen sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mendengarkan, memotivasi dan memberikan saran untuk kelancaran skripsi saya.
8. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II saya yang telah membimbing, senantiasa memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.
9. Kepala Sekolah MI Najahiyah Palembang, Bapak Ali Amin, S.Pd.I dan Kepala Tata Usaha Ibu Nyimas Rohmah, S.Pd.I beserta staffnya, terkhusus Guru-guru MI Najahiyah yang senantiasa membantu saya untuk memberikan data-data dan sekaligus menjadi lokus penelitian skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu saya dalam mengurus segala urusan akademik.
11. Seluruh teman-teman Administrasi Publik angkatan 2013 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan menginspirasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Palembang, Juli 2019

Penulis

Mar'atus Sholihah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Implementasi Kebijakan Publik.....	13
B. Model-model Implementasi Kebijakan	14
1. Model Van Metter dan Van Horn.....	15
2. Model Mazmanian dan Sabatier	17
3. Model Merilee S Grindle	19
4. Model Ripley dan Franklin	20
5. Model George Edward III	21
C. Teori yang Digunakan Dalam Penelitian.....	24
D. Program Indonesia Pintar	26
E. Peraturan.....	30
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
G. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Definisi Konsep	37
IX	
C. Fokus Penelitian	38
D. Unit Analisis.....	38

E. Informan Penelitian	38
F. Data dan Sumber Data.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisa Data	40
I. Sistematika Penulisan.....	40
BAB.IV PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum	42
1. Kota Palembang	42
2. Kecamatan Seberang Ulu 1	49
3. Historis dan Geografis MI Najahiyah	51
4. Program Indonesia Pintar	58
B. Implementasi Program Indonesia Pintar di MI Najahiyah.....	70
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	72
2. Sumber Daya.....	77
3. Karakteristik Agen Pelaksana	80
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	82
5. Disposisi	86
6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	87
BAB.V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Penerima Kartu Indonesia Pintar Tahun 2016	4
2. Daftar Nama Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang .	5
3. Penelitian Terdahulu	30
4. Fokus Penelitian	38
5. Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Palembang.....	45
6. Data Penduduk Kota Palembang.....	46
7. Data Guru MI Najahiyah.....	53
8. Data Keadaan Siswa MI Najahiyah	55
9. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	56
10. Hasil Analisis PIP di MI Najahiyah	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Guru MI Najahiyah.....	10
2. Model Ripley dan Franklin.....	57
3. Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III	23
4. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn.....	26
5. Kartu Indonesia Pintar	29
6. Kerangka Pemikiran	36
7. Peta Administrasi Kota Palembang	44
8. Rumah Adat Kota Palembang	47
9. Skema Penyaluran Program Indonesia Pintar	68
10. Standar Operasional Prosedur PIP di MI Najahiyah.....	73
11. Kegiatan Wawancara di MI Najahiyah	81

LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi.....	95
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	96
3. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I.....	97
4. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II.....	99
5. Surat Penelitian	102
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016	103

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

<i>UUD 1945</i>	<i>: Undang-Undang Dasar 1945</i>
<i>PIP</i>	<i>: Program Indonesia Pintar</i>
<i>BSM</i>	<i>: Bantuan Siswa Miskin</i>
<i>KIP</i>	<i>: Kartu Indonesia Pintar</i>
<i>MIS</i>	<i>: Madrasah Ibtidaiyah Swasta</i>
<i>PKBM</i>	<i>: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar</i>
<i>KEMDIKBUD</i>	<i>: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</i>
<i>KEMENAG</i>	<i>: Kementerian Agama</i>
<i>RPJMN</i>	<i>: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional</i>
<i>JUKNIS</i>	<i>: Petunjuk Teknis</i>
<i>KKS</i>	<i>: Kartu Keluarga Sejahtera</i>
<i>TNP2K</i>	<i>: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</i>
<i>SIAP</i>	<i>: Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan</i>
<i>SD</i>	<i>: Sekolah Dasar</i>
<i>MI</i>	<i>: Madrasah Ibtidaiyah</i>
<i>SMP</i>	<i>: Sekolah Menengah Pertama</i>
<i>MTs</i>	<i>: Madrasah Tsanawiyah</i>
<i>SMA</i>	<i>: Sekolah Menengah Atas</i>
<i>MA</i>	<i>: Madrasah Aliyah</i>
<i>SMK</i>	<i>: Sekolah Menengah Kejuruan</i>
<i>NPSN</i>	<i>: Nomor Pokok Sekolah Nasional</i>
<i>KPS</i>	<i>: Kartu Perlindungan Sosial</i>
<i>PKH</i>	<i>: Program Keluarga Harapan</i>
<i>SKTM</i>	<i>: Surat Keterangan Tidak Mampu</i>
<i>SKKM</i>	<i>: Surat Keterangan Keluarga Miskin</i>
<i>SK DIRJEN</i>	<i>: Surat Keputusan Direktorat Jenderal</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai bekal untuk mendapat kehidupan yang layak. Pendidikan pada dasarnya memberikan kita pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk khalayak banyak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan sangat berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Secara umum bisa dikatakan bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup untuk mendapat kualitas hidup yang lebih baik.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi bahwa :

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Hal ini terbukti dengan memberikan kemudahan mengakses pendidikan kepada masyarakat melalui beasiswa siswa berprestasi dan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi keluarga kurang mampu.

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang berupa pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (Sekolah/Madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan

Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama).

Program ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Puan Maharani. Penyelenggara dari program ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Tujuan dari Program ini (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) adalah untuk :

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang terkait dengan Program Indonesia Pintar segera merespon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden dimaksud. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar.
2. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.
3. Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama.
4. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar.
5. Menjadi pengguna anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama, dan

6. Melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(Sumber : JUKNIS PIP Pada Pendidikan Keagamaan Islam, 2016 : 5)

Penerima KIP adalah anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya anak-anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan melaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk diusulkan sebagai penerima manfaat program tersebut. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat bahwa Kartu Indonesia Pintar akan diberikan kepada 19,5 juta anak usia sekolah (6-21 tahun) baik dari keluarga/rumah tangga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun 2016. Berikut ini merupakan tabel data jumlah seluruh penerima Kartu Indonesia Pintar di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015-2016 :

Tabel 1
Data Penerima Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015-2016

Jenjang Pendidikan	2015		2016*	
	Sasaran	Anggaran	Sasaran	Anggaran
Kemendikbud				
SD	10,470,610	4,711,774,500,000	10,360,614	4,299,010,725,000
SMP	4,249,607	3,187,205,250,000	4,369,968	3,325,099,770,000
SMA	1,353,515	1,353,515,000,000	1,367,559	1,391,564,000,000
SMK	1,846,538	1,846,538,000,000	1,829,167	1,408,665,662,000
Jumlah Kemendikbud	17,920,270	11,099,032,750,000	17,927,308	10,424,340,157,000
Kemenag				
Mi/Ula/Sederajat	877,992	395,096,400,000	567,962	255,607,900,000
MTs/Wustha/Sederajat	1,020,616	765,462,000,000	671,862	503,787,000,000
MA/Ulya/Sederajat	552,964	552,965,000,000	380,378	380,980,000,000
Jumlah Kemenag	2,451,572	1,713,523,400,000	1,620,202	1,140,374,900,000
Total	20,371,842	12,812,556,150,000	19,547,510	11,564,715,057,000

(Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2016) ,
(<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/>)

Berdasarkan **Tabel 1** diatas, bisa kita lihat bahwa jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar pada Tahun 2016 mencapai 19.547.510 juta yang akan dibagikan ke jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA/Sederajat yang terdiri atas anak di bawah Kemendikbud 17,92 juta dan di bawah Kemenag 1,62 juta, dengan total anggaran Rp11,56 triliun yang akan di bagikan ke seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk menjangkau anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selama ini tidak dijamin. KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Berdasarkan data SIAP *Online* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tahun 2017 total keseluruhan sekolah yang ada di Kota Palembang berjumlah 1.00 sekolah dengan rinciannya yaitu 218 SD Swasta, 275 SD Negeri, 194 SMP Swasta, 69 SMP Negeri, 130 SMA Swasta, 31 SMA Negeri, 71 SMK Swasta, dan 12 SMK Negeri. Untuk lebih jelasnya mengenai data sekolah seluruh jenjang pendidikan yang ada di Kota Palembang dapat dilihat pada Lampiran I. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa tingkatan SD di Kota Palembang lebih banyak dari tingkatan SMP, SMA, dan SMK baik negeri maupun swasta.

Selanjutnya pada tingkatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, terdapat 16 Madrasah Ibtidaiyah yang juga telah menerapkan Program Indonesia Pintar ini untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Agama yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Daftar Nama Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

No	Nama Madrasah	NPSN	Alamat	Jumlah Siswa
1	MIS Al-Khoiriyah	60705195	Jalan KH.Azhari Lrg.Tangga Raja Kecamatan Seberang Ulu 1	132 siswa

2	MIS Al-Hidayah	60705187	Jalan Gub.H.Bastari Kecamatan Seberang Ulu 1	324 siswa
3	MIS An-Nuur	60705200	Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo Kecamatan Seberang Ulu 1	358 siswa
4	MIS Ar-Rahman	69854388	Jalan H.Faqih Usman RT.47 Kecamatan Seberang Ulu 1	145 siswa
5	MIS Az-Zahir	60705196	Jalan Bungaran V 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1	210 siswa
6	MIS Bakti NH	10604023	7 Ulu Lorong Garuda 1 Kecamatan Seberang Ulu 1	81 siswa
7	MIS Daruttazibil Islamy	60705191	Jalan KH. Azhari Lorong Sepakat Kecamatan Seberang Ulu 1	109 siswa
8	MIS Hijriyah II	60705197	Jalan KH. Azhari Lorong Pasiran RT.45 Kecamatan Seberang Ulu 1	1.120 siswa
9	MIS Hijriyah VI	60705190	Jalan KH. Azhari Lorong Sungai Aur Kecamatan Seberang Ulu 1	285 siswa
10	MIS Ma'had Islamy	60705192	Jalan H.Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu 1	166 siswa
11	MIS Muhajirin	60705188	Jalan Gub. H. Bastari No.15 RT.20 Kecamatan Seberang Ulu 1	142 siswa
12	MIS Najahiyah	60705193	Jalan KH.M.Asyik 3-4Ulu No.30 RT.29 RW.09 Kecamatan Seberang Ulu 1	476 siswa
13	MIS Muta'alimin	60705198	Jalan H.Faqih Usman Kecamatan Seberang Ulu 1	194 siswa
14	MIS Nurul Aitam	60705189	Jalan A.Yani Lorong H.Umar Kecamatan Seberang Ulu 1	203 siswa
15	MIS Subulussalam	60705199	Jalan Tembok Baru Lorong Tanjung Kecamatan Seberang Ulu 1	79 siswa
16	MIS Wathoniyah	60705194	Jalan KH.Azhari RT.03 5Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1	384 siswa

(Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa MI Hijriyah II berada di urutan pertama siswa terbanyak, kemudian di urutan kedua MI Najahiyah, dan setelahnya MI Wathoniyah. Rekomendasi dari pihak Kementerian Agama MI Najahiyah memiliki lebih banyak siswa yang kurang mampu dibanding MI Hijriyah II. Oleh karena itu berdasarkan rekomendasi dari pihak Kemenag penulis mengambil lokasi penelitian di MI Najahiyah.

Salah satu upaya agar Program Indonesia Pintar di Madrasah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa

Madrasah Tahun Anggaran 2016 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah tahun 2016 yakni disebutkan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Kesehatan Sejahtera (KKS) , atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Berikut kriterianya :

- a. Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dan atau siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Perlindungan Sosial / Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS) dan atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Selain Kriteria diatas, apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar melalui Format Usulan Madrasah (FUM) dengan memenuhi salah satu kriteria berikut:
 1. Siswa dari keluarga kurang mampu dan atau telah ditetapkan sebagai penerima manfaat BSM/PIP tahun 2015 yang memiliki Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa dan;
 2. Siswa yang berasal dari Panti Sosial/ Panti Asuhan/ yang dikelola oleh Kementerian Sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
 3. Siswa yang menjadi korban musibah bencana alam dibuktikan dengan Surat Keterangan Terkena Musibah dari kelurahan/desa/madrasah;

4. Pertimbangan lain : siswa aktif berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kelurahan / desa / madrasah / pimpinan pondok pesantren dengan kriteria;
 - a) Berada di ma'had/pesantren/asrama
 - b) Mengalami kelainan fisik
 - c) Yatim dan atau piatu,
- c. Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa memiliki KIP/KKS/KPS atau peserta program PKH dibuktikan dengan SKRTM/SKTM/SKKM dari Kelurahan/desa/madrasah.
- d. Berada pada usia sekolah yakni 6-21 tahun.

Penjelasan diatas, disimpulkan bahwa setiap anak usia sekolah 6-21 tahun pemegang Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu berhak mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan Opini Tentang Problematik Kartu Indonesia Pintar yang ditulis oleh Darmaningtyas, salah satu aktivis pendidikan dari Tamansiswa Yogyakarta bahwa :

“Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi dalam bidang pendidikan yang bertujuan menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah. Dengan demikian, mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik, mencegah murid mengalami putus sekolah, serta mendorong anak yang putus sekolah kembali bersekolah”.

Secara konseptual, program ini sebetulnya cukup jelas, termasuk sasaran penerimanya. Namun, pada tingkat implementasinya cukup problematik, baik menyangkut validitas data yang dipakai maupun metode penyalurannya.

Informasi yang dilihat dari Media Indonesia Online (<http://m.mediaindonesia.com>, diterbitkan pada 02 Agustus 2017, pukul 00:15 WIB), menyebutkan bahwa masalah yang ada dalam program KIP ini adalah pertama, masalah yang dipakai berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang surveinya mungkin pada tahun 2011 sehingga data yang tersaji kedaluwarsa profil murid maupun orangtua banyak yang berubah. Bukan hal yang aneh bila ada murid yang sudah lulus justru mendapatkan KIP. Persoalan akurasi data itu pula yang menyebabkan penyaluran KIP pada masa Mendikbud Anies Baswedan tersendat. Persoalan kedua, soal penyaluran dana. Masalah metodologi penyaluran dana KIP itu bukan hal sederhana, mengingat nilai rupiah dalam KIP tidak boleh terpotong. Di sisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, hanya diberi toleransi menahan dana KIP satu bulan. Tapi penahanan uang dalam satu bulan tidak bermakna apa-apa jika dibandingkan dengan alokasi SDM yang harus disediakan perbankan guna penyaluran KIP. Padahal, kinerja direksi bank BUMN dinilai berdasarkan keuntungan yang disetor ke negara. Akibatnya, penyaluran dana KIP terlambat. Problem yang juga dihadapi oleh murid adalah saat hubungan dengan bank perlu bantuan orangtua. Tidak sedikit orangtua murid menyalahgunakan dana KIP.

Penjelasan sebelumnya merupakan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Selanjutnya, di MI Najahiyah hampir seluruh siswa pemegang KIP, KKS, dan KPS atau tergolong miskin tetapi tidak semua mendapatkan manfaat atau dana dari Program ini dikarenakan data yang didaftarkan ke Kementerian Agama dilihat dari data EMIS (*Education Management Information System*) tahun 2014 sehingga mengakibatkan banyak siswa pemegang KIP tahun 2016 tidak terdaftar sebagai penerima manfaat KIP. Adapun data siswa yang tergolong miskin di MI Najahiyah tahun 2016 dapat dilihat di Lampiran II. Dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada 473 siswa dari kelas I-VI di MI Najahiyah yang berstatus sebagai pemegang KIP, namun tidak seluruhnya yang menerima

manfaat dari program tersebut. Padahal dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap anak pemegang KIP berhak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Menurut Kepala Bagian Tata Usaha MI Najahiyah, Nyimas Rohmah, S.Pd.i menyebutkan bahwa jumlah siswa MI Najahiyah berjumlah 476 siswa. Jumlah pemegang KIP sebanyak 473 siswa, dan yang menjadi penerima manfaat KIP pada Tahun 2016 berjumlah 86 siswa. Data Siswa Penerima manfaat KIP di MI Najahiyah Tahun 2016 dapat dilihat di Lampiran III.

Penjelasan lampiran diatas, dapat kita lihat bahwa adanya masalah akurasi data dimana banyak siswa yang kurang mampu atau sebagai pemegang KIP tetapi tidak menerima manfaat dari Program ini. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sejauh ini masih ditemukan banyak masalah-masalah atau hambatan-hambatan di lapangan, yaitu masalah akurasi data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan ketidakpahaman siswa atau guru mengenai PIP.

Selanjutnya, di MI Najahiyah ini terdapat 23 pegawai dimana 5 PNS dan 18 Non PNS, dari 23 pegawai tersebut yang mengurus program ini hanya satu guru saja, sedangkan guru lainnya ketika ditanya banyak yang tidak tahu. Berikut gambaran keadaan guru di MI Najahiyah :

Gambar 1.
KEADAAN GURU

Status	Jenjang Pendidikan								Total		
	<S.1		S.1		S.2		S.3				
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Jml
PNS	0	0	2	3	0	0	0	0	2	3	5
Non PNS	1	2	0	15	0	0	0	0	1	17	18
Jumlah	1	2	2	18	0	0	0	0	3	20	23

Penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa dari 23 jumlah guru yang paham mengenai program ini hanya satu saja, menunjukkan kurangnya pemahaman guru terhadap PIP dikarenakan sosialisasi yang kurang dengan Kementerian Agama dan komunikasi

antar sesama guru. Padahal telah jelas disebutkan dalam SK DIRJEN Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Program Indonesia Pintar untuk Madrasah Swasta adalah guru menginformasikan kepada siswa yang memiliki KIP untuk segera melapor ke madrasah untuk kemudian diusulkan ke Kementerian Agama. Dalam hal ini peran guru juga penting untuk menyukseskan program ini, jika guru tidak paham maka akan terjadi ketidakpahaman pula dengan siswa, sehingga mengakibatkan program ini belum bisa berjalan dengan baik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PIP di MI Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016 juga masih terdapat masalah atau hambatan yang diindikasikan dari beberapa gejala, yaitu :

1. Kesimpangsiuran data dalam pendistribusian yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar, karena data yang digunakan dilihat dari data EMIS (*Education Management Information System*) tahun 2014 sehingga mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dalam pembagian KIP.
2. Ketidaktepatan sasaran mengakibatkan kurang meratanya pembagian Kartu Indonesia Pintar terhadap siswa di Mi Najahiyah sehingga menimbulkan kecemburuan pada siswa dan keluhan dari orangtua yang anaknya tidak mendapatkan manfaat KIP.
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama mengakibatkan kurang pemahamannya siswa atau guru terhadap PIP.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016 sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan solusi dari permasalahan di MI Najahiyah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tentang Implementasi Program Indonesia Pintar ini, diharapkan akan adanya hasil yang dapat memberikan berbagai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis kepada berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. Selain itu, diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan program dalam bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai saran, masukan, dan informasi bagi Kementerian Agama Kota Palembang agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa mendatang dapat terlaksana lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Alfatih , Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung : UNPAD PRESS.
- Jauhari, Heri. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.
- Pressman, Jeffrey. L. Dan Aaron Wildavsky. 1984. *Implementation*. Los Angeles : University of Kalifornia Press.
- Randall, B Ripley. Dan Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Unsri, FISIP. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya : FISIP UNSRI.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Yousa, Amri. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara. Bandung : FISIP Universitas Padjajaran.

Perundang-undangan:

- Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif*. 2014. Jakarta: Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Keagamaan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Keagamaan Islam Nomor 2476 Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam. 2016*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang *Pedoman Program Indonesia Pintar. 2015*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Program Indonesia Pintar. 2016*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 2.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis:

- Fazila, Amira. 2016. *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus di SMP N 9 SungaiRaya Kabupaten Kubu Raya)*. Jurnal. Pontianak: FISIP Universitas Tanjungpura.
- Ramadhan, K. Ghafuur. 2015. *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) di Kecamatan Sambas*. Jurnal. Kalimantan Barat: FISIP Universitas Tanjungpura.
- Sinulingga, Rosiana. 2014. *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri di Kota Binjai*. Perspektif. Medan: MAP Universitas Medan Area.
- Syamsir, Nurfahira. 2014. *Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin.
- Widodo, Budi. 2016. *Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak*. Skripsi. Yogyakarta: FT Universitas Negeri Yogyakarta.

Internet:

https://m.mediaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/115639-problematik-kartu-indonesia-pintar, diakses 02 Agustus 2017)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (online), (<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/>)